



Bab 5

Menuju Kompetisi Global melalui Potensi Lokal: Strategi Pengembangan IMKM Perikanan di Maluku

Penulisan sitasi untuk bab ini

Asshagab, S.M., N. Evandani dan A.M. Hasanah (2023), 'Menuju Kompetisi Global melalui Potensi Lokal: Strategi Pengembangan IMKM Perikanan di Maluku', dalam Widiana, A., G.Hadiwidjaja, M. Sapulette dan E. Simarmata (eds.) *Membangun UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia Timur*. Jakarta: ERIA dan Kementerian Perdagangan, pp.74-105

Menuju Kompetisi Global Melalui Potensi Lokal: Strategi Pengembangan IMKM Perikanan di Maluku

Sri Milawati Asshagab, Niche Evandani, dan Asia Micolayati Hasanah

Abstrak

Maluku memiliki sumber daya alam melimpah pada sektor perikanan, namun pemanfaatan potensi lokal tersebut masih belum optimal. IMKM mendominasi struktur industri pengolahan perikanan di Indonesia yang secara umum masih berfokus pada pasar domestik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi pengembangan IMKM perikanan di Maluku agar dapat meningkatkan daya saing ekspor sektor tersebut pada kompetisi global. Studi ini menggunakan matriks BCG untuk memetakan posisi produk olahan perikanan Indonesia yang dianggap dapat mewakili posisi produk olahan perikanan seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Maluku, dengan berdasarkan pada kategori barang yang terdiri atas delapan kode HS. Selanjutnya, secara khusus dilakukan identifikasi terhadap faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan IMKM perikanan di Maluku. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih relatif rendah yang ditunjukkan dari belum adanya produk olahan perikanan yang mendominasi pasar ekspor (kuadran “Cash Cow”). Terdapat dua kode HS (03.07 dan 03.08) masuk dalam kuadran “Star” (pangsa pasar relatif tinggi, pertumbuhan pasar tinggi), tiga kode HS (03.04, 16.04, dan 16.05) berada pada kuadran “Question Mark” (pangsa pasar relatif rendah, pertumbuhan pasar tinggi), dan sisanya tiga kode HS (03.03, 03.05, dan 03.06) tergolong dalam kategori “Pet” (pangsa pasar relatif rendah, pertumbuhan pasar rendah). Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi investasi secara jangka panjang dengan melibatkan kolaborasi multi pihak yang diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi pada komponen-komponen produksi dan pemasaran, jaminan mutu, sumber daya manusia dan permodalan, dan infrastruktur.

Kata Kunci: Maluku, Kompetisi, Potensi Lokal, IMKM, Perikanan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

“Kita percaya bahwa sektor yang bisa membawa Indonesia untuk tetap tumbuh adalah sektor maritim, perikanan, dan turisme.” (Fajriah, 2016)

Pernyataan Susi Pudjiastuti¹ di atas sejalan dengan pesan Soekarno² yang mengatakan bahwa Indonesia harus kembali ke laut agar berjaya kembali (Fajriah, 2016). Kedua pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Rokhmin Dahuri³ menyampaikan bahwa total potensi ekonomi Indonesia dari sektor maritim diperkirakan mencapai USD 1.348 triliun atau lima kali lebih besar dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang hanya tercatat Rp. 2.400 triliun. Dari sisi ketenagakerjaan, total potensi ekonomi sektor maritim Indonesia yang dapat digali dan dikembangkan ke berbagai bidang diproyeksikan dapat menyerap sedikitnya 45 juta tenaga kerja (Nasution, 2021).

Melihat tingginya nilai sektor tersebut, sebagai negara *archipelago* dengan dua pertiga wilayah berupa perairan laut, Indonesia seyogyanya menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai pusat kemakmuran dan penopang perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa saat ini (triwulan II 2022) sektor perikanan hanya berkontribusi sebesar 2,58% atau Rp. 126,70 triliun terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atas dasar harga berlaku (Badan Pusat Statistik, 2022a, 2022b) dan baru menyediakan lapangan kerja bagi tujuh juta orang (World Bank, 2021). Mengacu pada data yang dirilis oleh *ITC (n,d)*, nilai ekspor produk olahan perikanan Indonesia di tahun 2021 mencapai USD 5,1 miliar atau tumbuh sekitar 9% dibandingkan tahun 2020. Artinya, sektor perikanan tetap menggigil selama pandemi Covid-19. Meskipun demikian, di kancah internasional, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-12 negara eksportir ikan dan produk ikan terbesar di dunia (Statista, 2021), padahal dalam hal produksi, Indonesia tercatat sebagai produsen ikan terbesar ketiga di dunia setelah China dan India (Fishtrout, 2020).

Kondisi tersebut tidak mengherankan jika dilihat dari komposisi industri pengolahan perikanan di Indonesia saat ini yang sebagian besar masih dikelola oleh Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM)⁴, dengan rincian: 1) industri mikro sebanyak 38.876 perusahaan (81,34%); 2) industri kecil sebanyak 6.870 perusahaan (14,37%); 3) industri menengah sebanyak 1.795 perusahaan (3,76%); dan 4) industri besar sebanyak 251 perusahaan (0,53%) (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Adapun volume produk olahan hasil perikanan berdasarkan kategori skala usaha dapat dilihat pada Gambar 5.1.

¹ Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja (2014 – 2019).

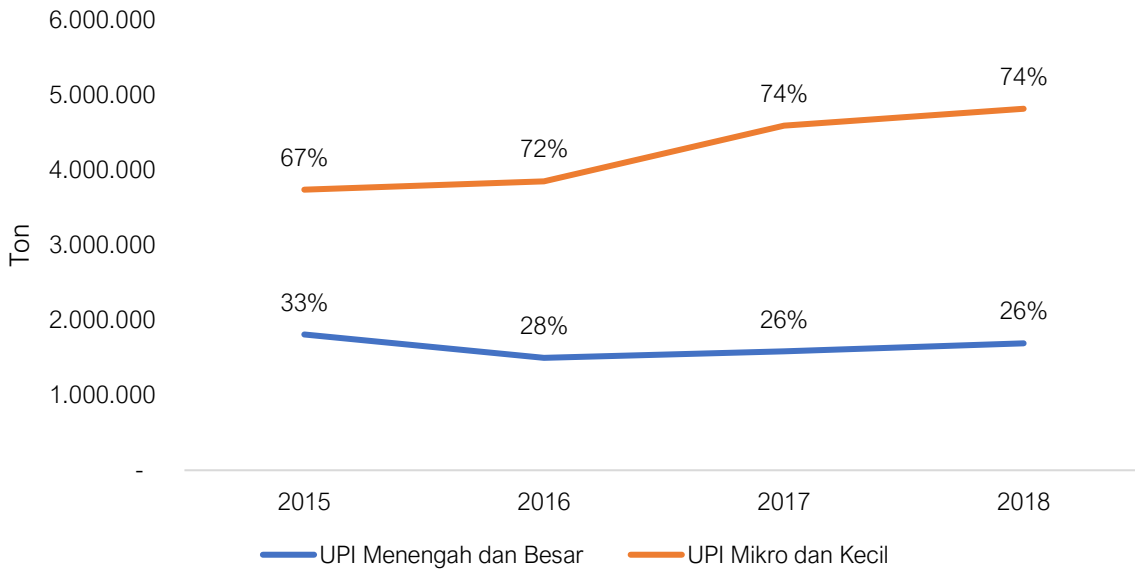
² Presiden Republik Indonesia (RI) pertama.

³ Guru Besar Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong (2001 – 2004).

⁴ Industri kecil mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Industri menengah mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000 atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000 (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2016. Industri mikro atau industri rumah tangga mempekerjakan paling banyak empat orang tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, n.d.a.).



Gambar 5.1: Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2018



Keterangan: UPI (Unit Pengolahan Ikan)

Sumber: Wibowo dan Widria (2019)

Meskipun secara produktivitas besar, Wibowo dan Widria (2019) mencatat bahwa pelaku usaha skala mikro dan kecil secara umum masih berfokus pada pasar domestik, sedangkan mayoritas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha skala menengah dan besar telah disalurkan ke pasar ekspor. Daya saing masih menjadi isu utama pelaku usaha dalam negeri sulit untuk bersaing pada pasar internasional (Wibowo & Widria, 2019; Yusuf, 2019). Padahal, produk perikanan yang diminati oleh konsumen pasar global adalah yang memiliki daya saing⁵ tinggi (Pramono et al., 2015; Saferina, 2019).

Peningkatan daya saing ekspor dapat dicapai melalui langkah-langkah kebijakan yang lebih luas yang mengakui peran penting hulu yang dimainkan oleh IMKM. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus disesuaikan untuk mencerminkan pandangan holistik produksi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan skala besar seperti perikanan. Program-program yang memberikan informasi yang lebih besar kepada IMKM tentang peluang baru dan membantu mempromosikan hubungan dan kemitraan dengan perusahaan besar, di dalam dan luar negeri,

⁵ Dalam perdagangan internasional, daya saing didefinisikan sebagai ukuran keuntungan atau kerugian suatu negara dalam menjual produknya di pasar internasional ("OECD glossary of statistical terms - Competitiveness (in international trade) definition," 2014). Daya saing merupakan konsep ekonomi yang luas dan mencerminkan kinerja keseluruhan dari perekonomian suatu negara dibandingkan dengan yang lain (Li, 2017). Daya saing merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki pelaku usaha agar berhasil di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Daya saing tidak dapat dipisahkan dari nilai tambah karena perusahaan perlu menciptakan nilai untuk menjadikannya kompetitif (Lind, 2005).

dapat memungkinkan IMKM untuk lebih memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki dalam produksi barang dan jasa setengah jadi (OECD, 2018). Akses kepada program-program strategis tersebut masih belum merata di seluruh Indonesia yang menyebabkan tidak terciptanya kesempatan yang sama bagi seluruh IMKM untuk berkembang dan berkompetisi pada skala global. Kesempatan ini khususnya lebih minim didapatkan oleh pelaku usaha yang ada di wilayah timur Indonesia seperti Maluku.

1.2. Posisi Maluku

Maluku merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia dan mempunyai potensi perikanan melimpah, namun belum berbanding lurus dengan daya saing industri pengolahannya. Berada pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 714, 715, dan 718⁶, membuat potensi ikan di wilayah perairan Maluku adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 37% atau 4,39 juta ton per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022). Tidak hanya berasal dari perikanan tangkap, wilayah Maluku juga merupakan lingkungan strategis untuk lahan budidaya perikanan yang saat ini masih belum optimal dikembangkan, dimana pemanfaatan lahan budidaya laut masih 5%, budidaya air payau 3,5%, dan budidaya air tawar di bawah 2% (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2021). Posisi vital Maluku untuk sektor perikanan juga terlihat dari sempat dipilihnya provinsi tersebut untuk pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang ditargetkan selesai pada tahun 2023. Namun, karena beberapa kendala, proyek tersebut akhirnya belum bisa dilanjutkan (Kusumawardhani, 2022).

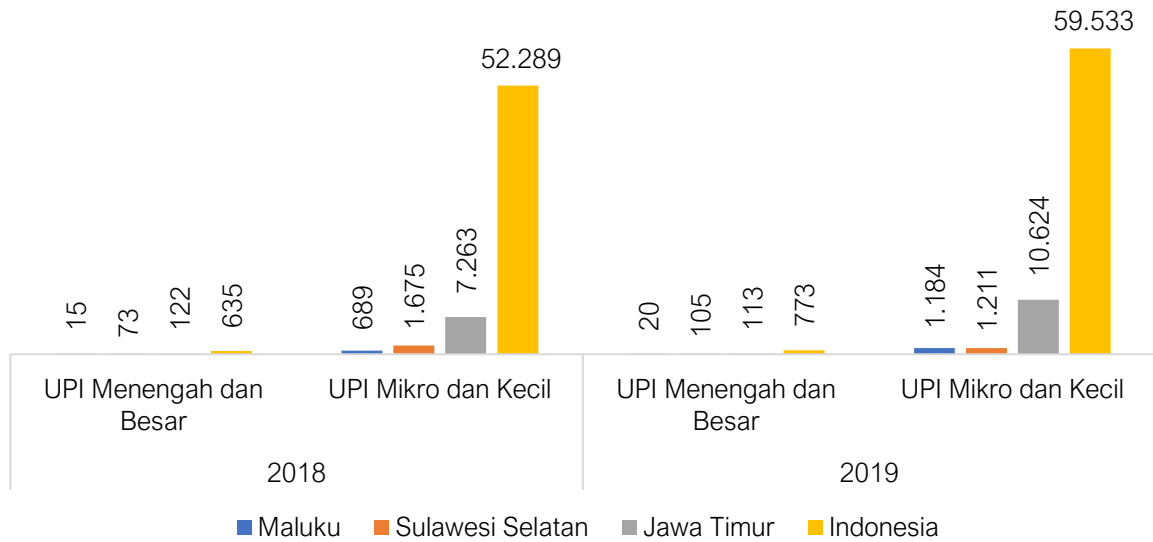
Melihat posisi strategis Maluku, berbagai penelitian pun telah dilakukan untuk mengkaji sektor perikanan dan industri pengolahan perikanan di wilayah tersebut. Di tahun 2013, Apituley mengembangkan strategi untuk pemasaran ikan segar di kawasan Maluku Tengah. Pada tahun 2015, Hiariy dan Romeon meneliti tentang pemberdayaan ekonomi nelayan pengolah ikan asap di Desa Hative Kecil, Kota Ambon. Selanjutnya, Siahainenia dan Hiariy (2017) mengkaji perihal prospek pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) pengolahan ikan di Ambon. Sariyani et al., (2017) melakukan studi evaluasi terhadap usaha pengolahan suwir-suwir ikan cakalang di Desa Namlea. Jadera et al., (2017) menganalisis keunggulan bersaing ikan asap tunaca di kota Ambon. Adapun Apituley et al., (2018) memetakan rantai nilai ikan pelagis kecil di kota Ambon. Palyama dan Dharmayanti (2021) mengidentifikasi produktivitas pengolahan tuna beku pada PT. Maluku Prima Makmur di Kota Ambon. Terakhir, penelitian dari Talakua et al., (2022) membahas tentang nilai tambah pada usaha pengolahan ikan asar (asap) di Pantai Tanjung Marthafons Desa Poka.

Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa kajian seputar produk olahan perikanan di Maluku masih relatif terbatas dan hanya berfokus pada produk dengan teknologi sederhana atau bernilai tambah rendah yang ditujukan untuk konsumen lokal. Hal ini dikarenakan UPI di Maluku didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil sebanyak 1.184 unit, sedangkan skala menengah dan besar 20 unit. Jumlah UPI skala mikro dan kecil meningkat 72% dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 689 unit (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022) (Gambar 5.2).

⁶ WPP 714 terdiri atas Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPP 715 meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. WPP 718 merupakan Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.



Gambar 5.2: Jumlah UPI di Maluku Tahun 2018–2019



Sumber: (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Dominasi IMKM pada industri pengolahan perikanan di Indonesia menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih serius dalam menggali dan mengembangkan sektor ini, sehingga keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah dapat difasilitasi agar tidak menjadi kendala untuk bersaing pada pasar yang lebih luas atau pasar internasional. Penelitian ini diarahkan untuk dapat menghasilkan sebuah strategi pengembangan IMKM perikanan di Maluku, sehingga dapat meningkatkan daya saing pada sektor tersebut. Meningkatnya daya saing IMKM perikanan diharapkan dapat mengungkit kesejahteraan masyarakat di Maluku yang saat ini tergolong ke dalam 10 provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah sejak tahun 2016 – 2021⁷ (Badan Pusat Statistik, n.d.c.). Mempromosikan pengembangan dan internasionalisasi IMKM juga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Urata, 2021). Dengan demikian, upaya tersebut juga ditujukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)⁸ dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan berbasis pada ekonomi biru (*blue economy*) berdasarkan pada keunggulan daerah yang bersumber dari sektor perikanan dan kelautan.

⁷ Rata-rata nilai IPM Maluku selama periode 2016 – 2021 adalah 68,89 (kategori sedang).

⁸ Khususnya terkait dengan tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), 10 (pengurangan kesenjangan), 11 (keberlanjutan kota dan komunitas), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

2. Pengembangan Produk Olahan IMKM Perikanan

2.1. Pemetaan Posisi Produk Olahan Perikanan

Untuk memetakan posisi produk olahan perikanan saat ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif melalui alat analisis *Boston Consulting Group Matrix* (matriks BCG). Matriks tersebut menekankan pada dua dimensi utama, yaitu pangsa pasar (*market share*) dan pertumbuhan pasar (*market growth*). Pangsa pasar merupakan suatu pengukuran besar relatif, dari sebuah usaha dibandingkan dengan usaha lainnya dalam pasar yang sama (yang dilayani), namun bukan merupakan pengukuran besar relatif dalam rantai nilai (Edwards, 1994). Sementara itu, pertumbuhan pasar adalah peningkatan jumlah orang yang membeli produk atau layanan tertentu, atau jumlah produk, dan lain-lain yang dijual ("Market growth," n.d.). Kedua faktor tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk membantu perusahaan memilih strategi bisnis berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh (BCG Global, n.d.).

Pemetaan produk berdasarkan matriks BCG ini penting dilakukan sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus diambil pada tingkatan lokal (di Maluku). Pemetaan akan dilakukan terhadap produk perikanan Indonesia pada pasar global karena kinerja produk olahan perikanan Indonesia pada pasar luar dapat dianggap secara umum mewakili posisi produk olahan perikanan seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Maluku. Dalam hal ini, pemetaan akan dilakukan berdasarkan ketentuan kode HS (*Harmonized System*). Dari 29 kategori barang untuk produk kelautan dan perikanan yang teridentifikasi dalam kode HS, pemetaan akan dilakukan khusus untuk produk olahan hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia baik yang melalui proses tradisional maupun semi modern, mulai dari dibekukan, dicincang, dikeringkan, diasinkan, diasapi, dimasak, atau diawetkan. Dengan demikian, diperoleh delapan kode HS berikut ini yang memenuhi kriteria tersebut (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021):

- a. Kode HS 03.03 – Ikan; beku, tidak termasuk filet ikan dan daging ikan lainnya dalam pos 03.04;
- b. Kode HS 03.04 – Filet ikan dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak); segar, dingin atau beku;
- c. Kode HS 03.05 – Ikan, kering, asin atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, makanan dan pelet ikan, layak untuk dikonsumsi manusia;
- d. Kode HS 03.06 – Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin, atau dalam air garam; diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; tepung yang dapat dimakan, makanan, atau pelet.
- e. Kode HS 03.07 – Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; moluska diasapi, berkulit maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, makanan dan pelet moluska, layak untuk dikonsumsi manusia;
- f. Kode HS 03.08 – Invertebrata air, selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam, diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau

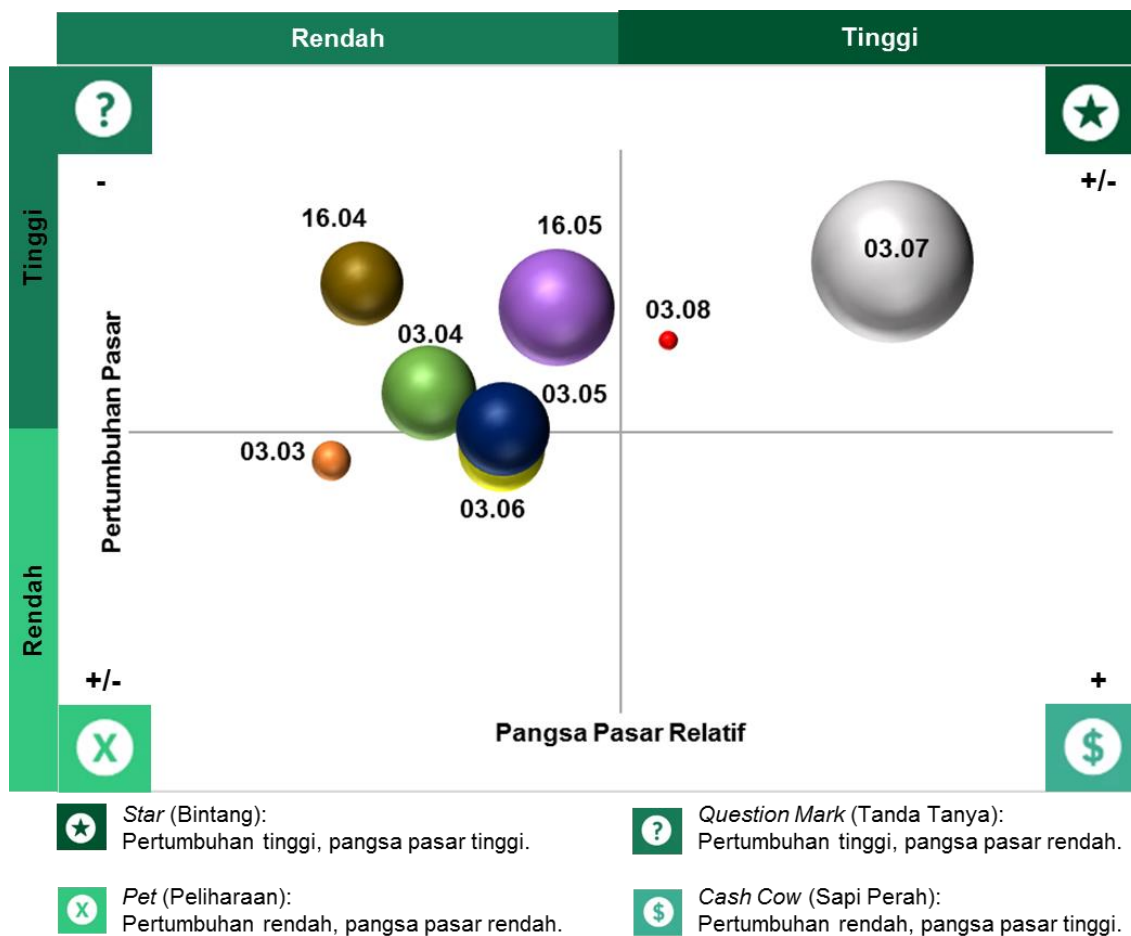


selama proses pengasapan; tepung, makanan, dan pelet, layak untuk dikonsumsi manusia;

- g. Kode HS 16.04 – Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan; dan
- h. Kode HS 16.05 – Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.

Hasil pemetaan kedelapan kategori produk di atas dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3: Matriks BCG Produk Perikanan Indonesia Periode 2017-2021



Keterangan:

- a. Pertumbuhan pasar merupakan persentase pertumbuhan rata-rata nilai ekspor dunia selama lima tahun (2017 – 2021) pada masing-masing kode HS;
- b. Pangsa pasar relatif diperoleh dari perbandingan persentase pangsa pasar Indonesia terhadap pangsa pasar negara eksportir terbesar pada masing-masing kode HS, dimana pangsa pasar terbesar pada kode HS 03.03, 03.04., 03.07, 03.08, 16.04, dan 16.05 dipegang oleh China. Sementara itu, Polandia menjadi eksportir dengan pangsa pasar terbesar pada kode HS 03.05 dan India pada kode HS 03.06.
- c. Ukuran bola menunjukkan besaran nilai ekspor pada masing-masing kode HS.

- d. Data diolah dari nilai ekspor pada tahun 2017 – 2021 (International Trade Center, n.d.) dan gambar⁹ diadaptasi dari (BCG Global, n.d.);

Berdasarkan pemetaan pada Gambar 5.3, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

2.2.1. Kategori *Star* (Bintang)

Produk yang berhasil masuk pada kategori ini mempunyai pangsa pasar yang cukup signifikan (tinggi) dan berada di pasar dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi pula. Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat dua kode HS yang masuk di area ini, yaitu: kode HS 03.07 dan 03.08. Adapun ukuran lingkaran pada kode HS menunjukkan besarnya nilai transaksi ekspor pada masing-masing produk. Semakin besar ukurannya, maka semakin besar juga nilai transaksinya. Secara global, rata-rata nilai transaksi ekspor produk berkode HS 03.07 selama lima tahun terakhir mencapai USD 13,37 miliar. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi ekspor produk berkode HS 03.08 selama lima tahun terakhir berada pada kisaran USD 720,32 juta. Angka tersebut mengindikasikan bahwa permintaan pada pasar global cenderung lebih banyak untuk kategori produk di bawah kode HS 03.07, antara lain cumi-cumi, sotong, gurita, siput, tiram, kerang, dan abalone, dibandingkan permintaan pada produk dengan kode HS 03,08, yaitu teripang.

Menurut Future Market Insights (2022), pangsa pasar untuk produk-produk dengan kode HS 03.07 (moluska) akan meningkat hingga mencapai USD 98,54 miliar pada tahun 2032, dari ukuran pasar yang bernilai USD 60,72 miliar di tahun 2021. Adapun tingkat pertumbuhan per tahun selama periode tersebut diprediksi sebesar 4,5%. Tren kenaikan tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan selera dan preferensi konsumen, meningkatnya kepedulian terhadap masalah kesehatan, perubahan gaya hidup, dan peningkatan jumlah restoran di seluruh dunia.

Pangsa pasar yang besar berarti bahwa produk-produk “*Star*” memegang posisi pasar yang cukup kuat dan mampu menghasilkan penjualan yang tinggi pula. Meskipun demikian, pertumbuhan pasar yang tinggi juga berarti kompetisi yang tinggi pula. Dengan kata lain, posisi produk-produk pada kategori ini masih rentan di pasar karena kompetitor dapat mengambil tindakan agresif untuk menggeser posisinya. Hal ini berbeda apabila produk telah memasuki kuadran “*Cash Cow*”, dimana perusahaan sudah dapat menikmati arus kas yang cukup besar karena pertumbuhan pasar yang relatif rendah. Produk-produk pada kategori ini harus terus berusaha mempertahankan posisinya untuk jangka waktu yang lama sampai dengan pertumbuhan pasarnya cenderung rendah. Perusahaan dapat berinvestasi dan menjalankan program-program pemasaran yang tepat agar loyalitas pelanggan tetap terjaga mengingat produk-produk pada kategori ini dianggap mempunyai prospek yang bagus di masa depan.

2.2.2. Kategori *Question Mark* (Tanda Tanya)

⁹ Tanda + dan – dalam gambar menunjukkan arus kas, dimana arus kas untuk kuadran “*Star*” dan “*Pet*” bisa positif atau negatif. Sementara itu, arus kas pada “*Cash Cow*” bernilai positif dan arus kas pada “*Question Mark*” bernilai negatif.

Seperti namanya “*Question Mark*”, produk-produk yang masuk pada kategori ini menimbulkan pertanyaan karena diidentifikasi sebagai produk yang hanya menguasai pangsa pasar dengan persentase relatif kecil padahal pertumbuhan pasar cukup tinggi. Rendahnya pangsa pasar menunjukkan rendahnya daya saing produk, dimana produk sudah lama berada di pasar namun masih belum sanggup mendominasi pasar. Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa terdapat tiga produk olahan Indonesia berada pada kuadran ini, antara lain kode HS 03.04, 16.04, dan 16.05. Artinya, produk-produk tersebut memerlukan banyak modal namun memiliki keuntungan yang cenderung kecil. Meskipun demikian, produk-produk tersebut juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk bertumbuh dan mendominasi pasar. Status produk pada kategori ini perlu dinaikkan menjadi produk “*Star*”. Untuk mencapai hal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan “mengapa pangsa pasarnya relatif kecil?”, misalnya karena masalah kualitas, harga, layanan, atau alasan lainnya.

Jika mengacu pada kode HS 03.04 (filet ikan), dapat diidentifikasi bahwa masalah rendahnya pangsa pasar produk-produk di bawah kode HS tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya jumlah permintaan impor filet ikan dan produk daging ikan lainnya dari pasar Jepang yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia. Penurunan tersebut dipicu oleh perubahan gaya hidup dan minat masyarakat Jepang terhadap ikan tuna yang merupakan produk unggulan ekspor Indonesia pada kategori ini (Anjaritha, 2017). Adapun alasan kecilnya pangsa pasar produk berkode HS 16.04 (kaviar) terjadi karena China mendominasi industri kaviar global dan membanjiri pasar dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut berpengaruh pada harga produk kaviar secara global yang harus turun drastis sebesar 58% dalam enam tahun terakhir (Chin et al., 2020).

Sementara itu, produk dengan kode HS 16.05 (krustasea dan moluska yang diolah atau diawetkan) memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dikarenakan adanya penurunan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor selama beberapa tahun terakhir, misalnya dari negara-negara Eropa (Perancis, Irlandia, Jerman, Spanyol, dan Swedia), Asia (Hong Kong, Vietnam, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Jepang), Rusia, Inggris, dan Amerika (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), 2022). Faktor penyebab penurunan tersebut antara lain masalah sertifikasi keberlanjutan (*sustainability certification*) yang belum bisa dipenuhi (CBI, 2021) dan isu keamanan pangan (Ningsih, 2018). Untuk itu, beberapa pilihan strategi yang dapat dijalankan terhadap produk-produk pada kategori ini antara lain dengan meningkatkan fitur dan kualitas produk, menetapkan harga yang lebih rendah, membangun jaringan distribusi yang lebih luas dan efektif, menaikkan loyalitas pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan.

2.2.3. Kategori *Pet* (Peliharaan)

Ada tiga kode HS produk yang masuk dalam kategori ini, yaitu kode HS 03.03, 03.05, dan 03.06. Produk yang masuk pada kuadran ini berarti memiliki penjualan yang relatif sedikit dan berada pada pasar dengan pertumbuhan yang rendah. Jumlah penjualan yang relatif kecil menunjukkan bahwa produk tersebut kurang kompetitif di pasar, dimana konsumen lebih memilih produk yang ditawarkan pesaing dengan harga yang lebih murah, rasa yang lebih enak, fitur yang lebih menarik, atau kualitas layanan yang lebih baik. Adapun pertumbuhan pasar yang rendah berarti pasar tersebut sudah berada pada kondisi matang.

Alasan kode HS 03.03 (ikan beku) dan kode HS 03.06 (krustasea beku atau dikeringkan) memiliki penjualan yang rendah adalah karena masalah pemrosesan yang dianggap kurang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan (*hygiene and safety-related aspects*). Produk-produk tersebut dianggap memiliki kualitas rendah karena mengandung kontaminan seperti kerikil, potongan bambu, bahkan kaki kecoa (Sufa, 2016). Selain itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga dianggap gagal melakukan analisis bahaya untuk menentukan apakah ada bahaya keamanan pangan yang mungkin terjadi dan memiliki rencana HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points* atau Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis) yang minimal mencantumkan titik kontrol kritis¹⁰ (Mackin, 2018).

Di sisi lain, rendahnya pangsa pasar untuk kode HS 03.05 (ikan kering, asin, atau asap) diketahui berasal dari perubahan pola konsumsi di dunia yang mengurangi jumlah asupan garam. Tren tersebut merupakan isu yang sensitif bagi kelompok produk di kategori ini (Flick, Jr., 2010). Dengan demikian, pilihan-pilihan strategi untuk produk-produk yang masuk pada kategori ini antara lain likuidasi, melepaskan atau memposisikan ulang produk. Pilihan-pilihan ini tergantung pada apakah suatu perusahaan dapat memperoleh pangsa pasar utama atau tidak sebelum pertumbuhan melambat. Semua produk pada akhirnya akan menjadi “*Cash Cow*” (Sapi Perah) atau “*Pet*” (Peliharaan) (BCG Global, n.d.).

¹⁰ Titik kontrol kritis atau titik kontrol kritis individu digunakan untuk memantau waktu kumulatif dan suhu paparan dari saat ikan pertama di lot diterima hingga ikan olahan terakhir dari lot ditempatkan di *freezer*.



2.2. Potensi dan Kontribusi Maluku Terhadap Ekspor Produk Olahan Perikanan Indonesia

Berdasarkan data Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (2021), Maluku menempati posisi kedelapan provinsi dengan jumlah produksi perikanan¹¹ terbesar di Indonesia (Gambar 5.4). Namun, dalam data ekspor produk olahan perikanan Indonesia selama lima periode (2017-2021), nama Maluku tidak pernah masuk dalam daftar 10 provinsi yang mempunyai kontribusi nilai ekspor terbesar (Gambar 5.5) (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), 2022). Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: 1) perusahaan pengelolaan ikan masih didominasi oleh skala IMKM yang belum berorientasi ekspor atau hanya menyasar pasar dalam negeri, khususnya pasar lokal; dan 2) sebagian besar hasil perikanan Maluku diolah di luar Maluku sebagai produk jadi karena belum ada pabrik pengolahan ikan untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat dijual dengan harga tinggi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

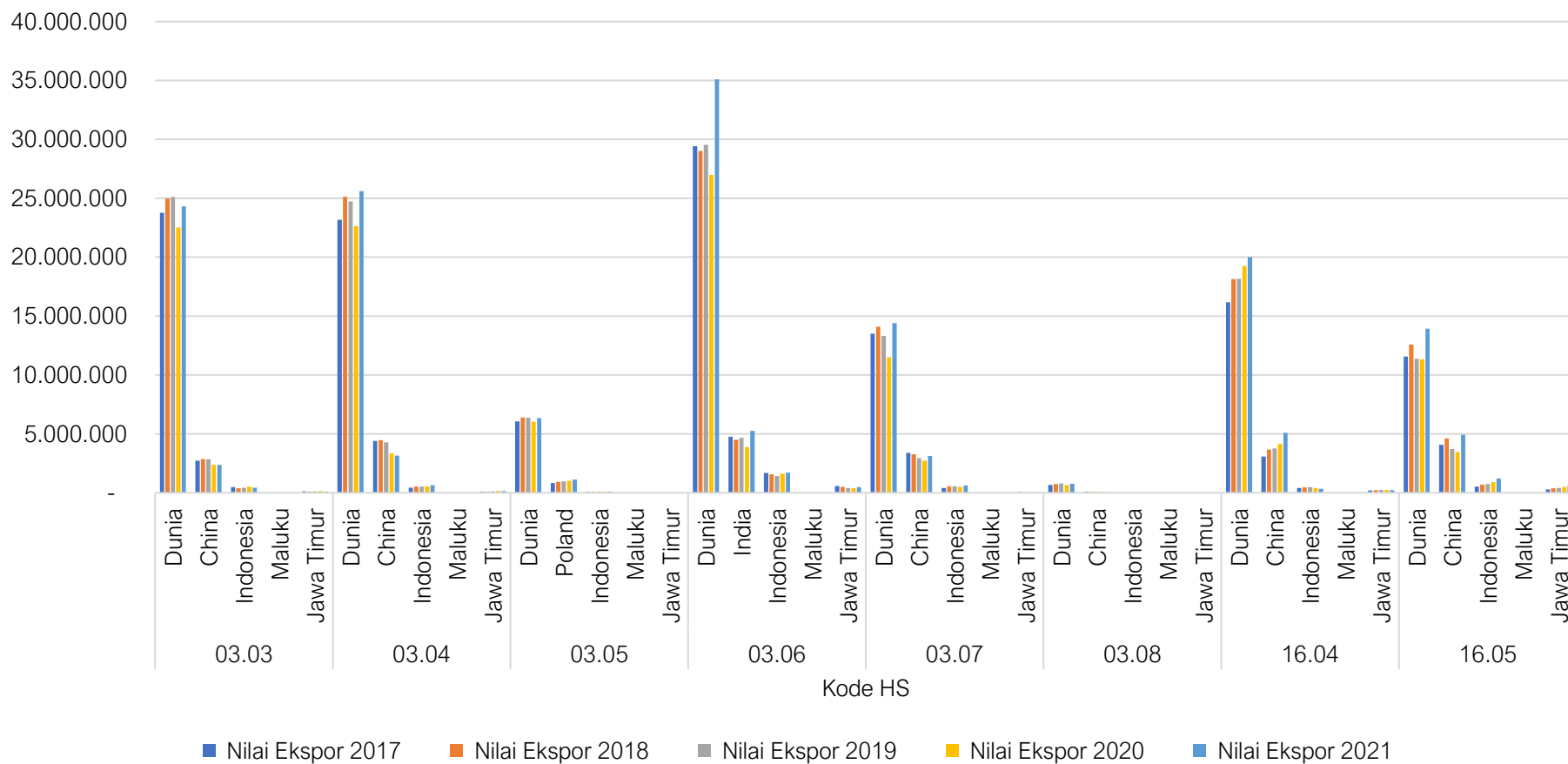
Gambar 5.4: Distribusi Produksi Perikanan di Indonesia (diurutkan Berdasarkan Jumlah Terbesar)



Sumber: Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (2021)

¹¹ Total produksi merupakan rata-rata selama lima tahun (2016 – 2020) dan terdiri atas perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD).

Gambar 5.5: Kontribusi Maluku terhadap Ekspor Produk Olahan Perikanan Indonesia Berdasarkan Nilai Ekspor Rata-Rata 2017-2021 (Ribu USD)



Keterangan: Nama negara pada masing-masing kode HS adalah eksportir terbesar yang dihitung berdasarkan nilai ekspor rata-rata dalam lima tahun (2017 – 2021), sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia dengan nilai ekspor terbesar selama lima tahun (2017 – 2021)
 Sumber: Data diolah dari (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku,2022), ITC (n.d.)

Gambar 5.5 menunjukkan bahwa kontribusi ekspor produk olahan perikanan yang berasal dari Maluku masih minim dibandingkan Jawa Timur, dimana Maluku hanya mencatat ekspor produk olahan perikanan pada beberapa kode HS, yaitu 03.03, 03.04, 03.05, dan 03.06. Hal tersebut mengindikasikan perlunya intervensi langsung dari pemerintah pusat dan regional untuk mengeskalasi kapasitas Maluku dalam mengolah sendiri produksi perikanan wilayahnya menjadi produk bernilai tambah agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

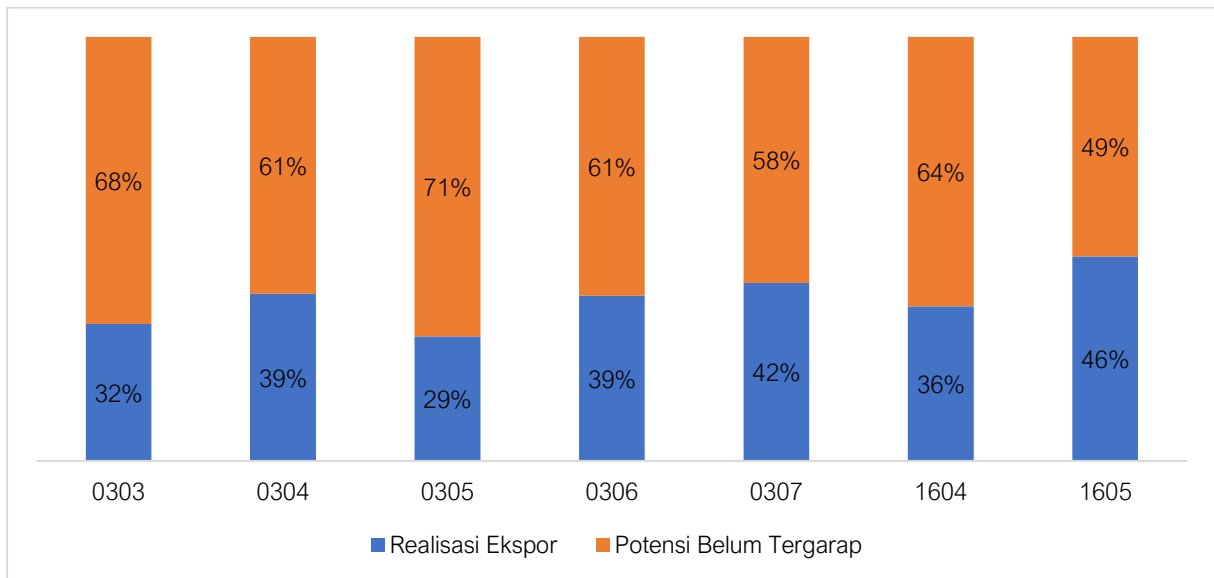
FAO (2020) menyebutkan bahwa banyak negara telah menggunakan teknologi pengawetan dan pengemasan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan, meningkatkan umur simpan, diversifikasi produk, dan meningkatkan efisiensi sumber daya perikanan untuk mendorong keberlanjutan sektor. Selain itu, FAO dalam Eurofish (2021) juga mengemukakan bahwa proporsi produk ikan olahan yang diawetkan dengan cara pengasinan (*salting*), pengeringan (*drying*), pengasapan (*smoking*), atau fermentasi (*fermenting*) menurun secara global dari 29% pada tahun 1960-an menjadi 10% pada tahun 2018. Oleh karena itu, praktik-praktik pengolahan ikan secara tradisional yang banyak dilakukan oleh IMKM di Maluku perlu didorong dan difasilitasi untuk beralih memanfaatkan teknologi yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan teknologi, strategi, dan manajemen yang tepat, Maluku masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan neraca perdagangan produk olahan hasil perikanan di pasar domestik dan luar negeri seiring dengan tren pergeseran pola hidup sehat dengan mengganti sumber protein yang berasal dari daging dengan ikan. Namun, ketatnya tingkat persaingan dalam perdagangan global menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan dengan menghasilkan berbagai produk yang kompetitif dengan mutu yang baik dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Adapun untuk target pasar ekspor, terdapat beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan sebelum memasukinya, yaitu jenis komoditas produk, daya saing, mutu produk, selera dan daya beli konsumen, jangka waktu pengiriman, dan analisis pasar negara tujuan ekspor termasuk kondisi sosial politik dan peraturan ekspor-impor yang berlaku (Bashir et al., 2019).

2.3. Peluang Peningkatan Ekspor Produk Olahan Perikanan

ITC (2022) mencatat bahwa saat ini total nilai ekspor produk olahan perikanan dunia mencapai USD 30 miliar dengan estimasi nilai ekspor di tahun 2026 mencapai USD 44 miliar. Sementara itu, Organization of Economic Co-operation and Development dan Food and Agriculture Organization (OECD-FAO, 2020) memproyeksikan bahwa pada tahun 2029, sebesar 90% produksi ikan akan dikonsumsi sebagai makanan. Pada tingkat global, ikan untuk konsumsi manusia diperkirakan meningkat sebesar 16,3%, atau bertambah 25 juta ton hingga mencapai 180 juta ton pada tahun 2029. Kondisi ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menggarap sektor perikanan secara lebih intensif dan berkelanjutan guna menaikkan nilai ekspor produk olahan perikanan yang saat ini masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari persentase realisasi ekspor produk olahan perikanan Indonesia terhadap dunia masih berkisar antara 29 – 46% dari total potensi ekspor (Gambar 5.6) (ITC, 2022).

Gambar 5.6: Potensi Ekspor Produk Olahan Perikanan Indonesia Terhadap Dunia Berdasarkan Kode HS



Keterangan: Data pada kode HS 0308 tidak tersedia
 Sumber: ITC (2022)

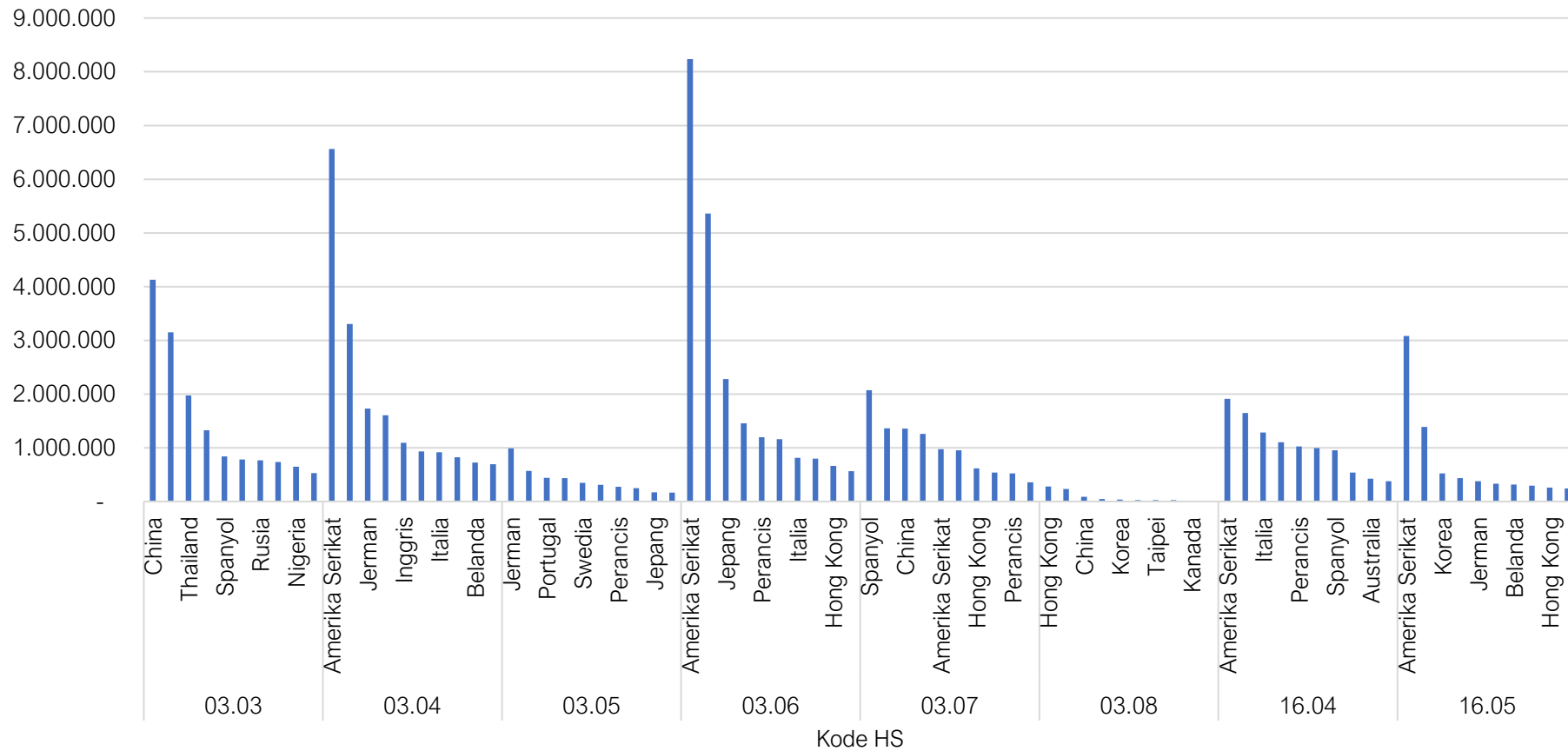
Tren peningkatan konsumsi ikan akan terjadi di seluruh benua, dimana preferensi bentuk produk hasil perikanan cenderung bervariasi (Gambar 7). Preferensi konsumen Asia dalam bentuk ikan segar, konsumen Eropa dan Amerika Utara dalam bentuk *frozen food*, konsumen Amerika Latin dalam bentuk bubuk dan minyak ikan, sementara konsumen Afrika dalam bentuk ikan yang telah diawetkan (Eurofish, 2021; FAO, 2020). Banyaknya ragam variasi produk hasil perikanan yang dikonsumsi menjadi peluang pasar yang besar untuk perdagangan secara global. Tidak hanya itu, globalisasi bisnis, termasuk gelombang restrukturisasi industri global, khususnya pasca pandemi telah semakin menarik IMKM ke dalam rantai nilai global melalui berbagai jenis kegiatan lintas batas (OECD, 2004). Terdapat bukti bahwa sekelompok IMKM dengan potensi pertumbuhan tinggi memerlukan akses awal ke pasar internasional untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan mereka (OECD, 2002). Proses globalisasi IMKM dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan lintas batas, termasuk perdagangan, investasi internasional, dan partisipasi dalam aliansi strategis, kemitraan dan pengaturan jaringan, yang mempengaruhi berbagai fungsi bisnis mulai dari penelitian dan pengembangan produk hingga distribusi.

Gambar 5.7 di bawah ini menunjukkan bahwa pasar produk olahan perikanan didominasi oleh Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan China. Hal ini sejalan dengan temuan Maximize Market Research (2022) yang menyebutkan bahwa Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat bersama-sama menyumbang 47% dari total konsumsi ikan sebagai pangan di dunia. Menurut MMR, sebagian

besar ikan diolah sebagai makanan dan sisanya untuk penggunaan komersial lainnya. Sementara itu, lima negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia secara nilai transaksi, yaitu Amerika Serikat, China, Jepang, Vietnam, dan Thailand (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), 2022). Hal yang perlu menjadi catatan Indonesia adalah saat ini Vietnam dan Thailand mengungguli Indonesia dalam persaingan produk olahan ikan di pasar global meskipun jumlah produksi perikanan tangkap Indonesia dua kali Vietnam dan empat kali Thailand (FAO, 2022). Kontribusi masing-masing negara pada kedelapan kode HS yang dibahas dalam buku ini adalah 6,39% (Vietnam), 4,25% (Thailand), dan 3,46% (Indonesia)¹² (ITC, n.d.).

¹² Sebagai perbandingan, China memegang pangsa pasar ekspor produk olahan perikanan pada kedelapan kode HS sebesar 15,06%.

Gambar 5.7: Negara Importir Terbesar Untuk Masing-Masing Kode HS (Ribu USD)



Keterangan: Nama negara pada masing-masing kode HS merupakan lima negara importir terbesar yang ditentukan berdasarkan nilai impor rata-rata selama lima tahun (2017 – 2021) (ITC, n.d.).

Sumber: (ITC, 2022)

Salah satu faktor yang membawa Vietnam mampu memegang pangsa pasar ekspor produk olahan perikanan yang cukup besar adalah karena komitmen yang kuat dari pemerintahnya untuk menjadikan negara tersebut sebagai pengeksport produk hasil perikanan terkemuka di dunia sehingga dapat berkontribusi sebesar 30-35% dari PDB sektor agro-kehutanan-perikanan (Hieu, 2019). Dengan strategi yang dikembangkan, banyak negara menganggap Vietnam sebagai negara yang aman untuk mengimpor produk hasil perikanan. Bahkan, selama masa pandemi Covid-19, tidak ada satupun pabrik pengolahan hasil perikanan di negara tersebut yang dihentikan sementara (Dao, 2021). Vietnam juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (*the EU-Vietnam Trade Agreement and Investment Protection Agreement*) yang menghilangkan 99% dari semua jenis bea masuk hingga 0% dan mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih (European Commission, 2019). Sementara itu, dua produsen patin Vietnam telah mendapatkan tarif *anti-dumping* 0% dan beberapa perusahaan lainnya memperoleh pengurangan tarif sehingga membantu memfasilitasi pengiriman produk ke pasar Amerika Serikat (Son, 2021).

Sementara itu, meskipun tidak masuk dalam 10 besar peringkat dunia dalam kategori hasil perikanan tangkap, Thailand berhasil menjadi salah satu negara pengolah dan pengeksport hasil perikanan terbesar di dunia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan pelaku industri. Untuk memenuhi harapan internasional, standar produksi dan manufaktur dalam hal keamanan pangan (*food safety*), ketertelusuran (*traceability*), integritas lingkungan (*environmental integrity*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan peraturan ketenagakerjaan (*labor regulations*) menjadi perhatian penting selama dekade terakhir (Holmyard, 2012).

Belajar dari kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia perlu lebih serius memperhatikan dan mengembangkan sektor perikanan dengan menekankan pada penjualan produk hasil olahan perikanan berkualitas tinggi dan tidak hanya menjual produk dengan nilai tambah yang rendah. Usaha tersebut perlu dilakukan dengan kerjasama lintas sektor untuk mendukung pembangunan industri perikanan yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa, melainkan juga di wilayah timur Indonesia seperti Maluku yang tercatat sebagai salah satu produsen ikan terbanyak di Indonesia. Peluang pasar ekspor produk olahan perikanan di masa depan harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan cara sejak dini mempersiapkan perusahaan dalam negeri, khususnya skala IMKM, untuk lebih ekspansif dan agresif dalam menyasar pasar ekspor.

2.4. Tantangan dalam Pengembangan IMKM Perikanan di Maluku

Mengembangkan sektor perikanan Indonesia dapat dimulai dari Maluku yang merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan utama Indonesia. Untuk itu, perlu untuk mengidentifikasi berbagai faktor masalah yang membatasi kemampuan Maluku mengoptimalkan sektor unggulannya, ditinjau dari sudut pandang IMKM sektor perikanan yang merupakan pemain utama di sektor ini. Hasil identifikasi menunjukkan tantangan pengembangan IMKM perikanan di Maluku disebabkan oleh setidaknya empat faktor utama sebagaimana digambarkan pada Gambar 8.

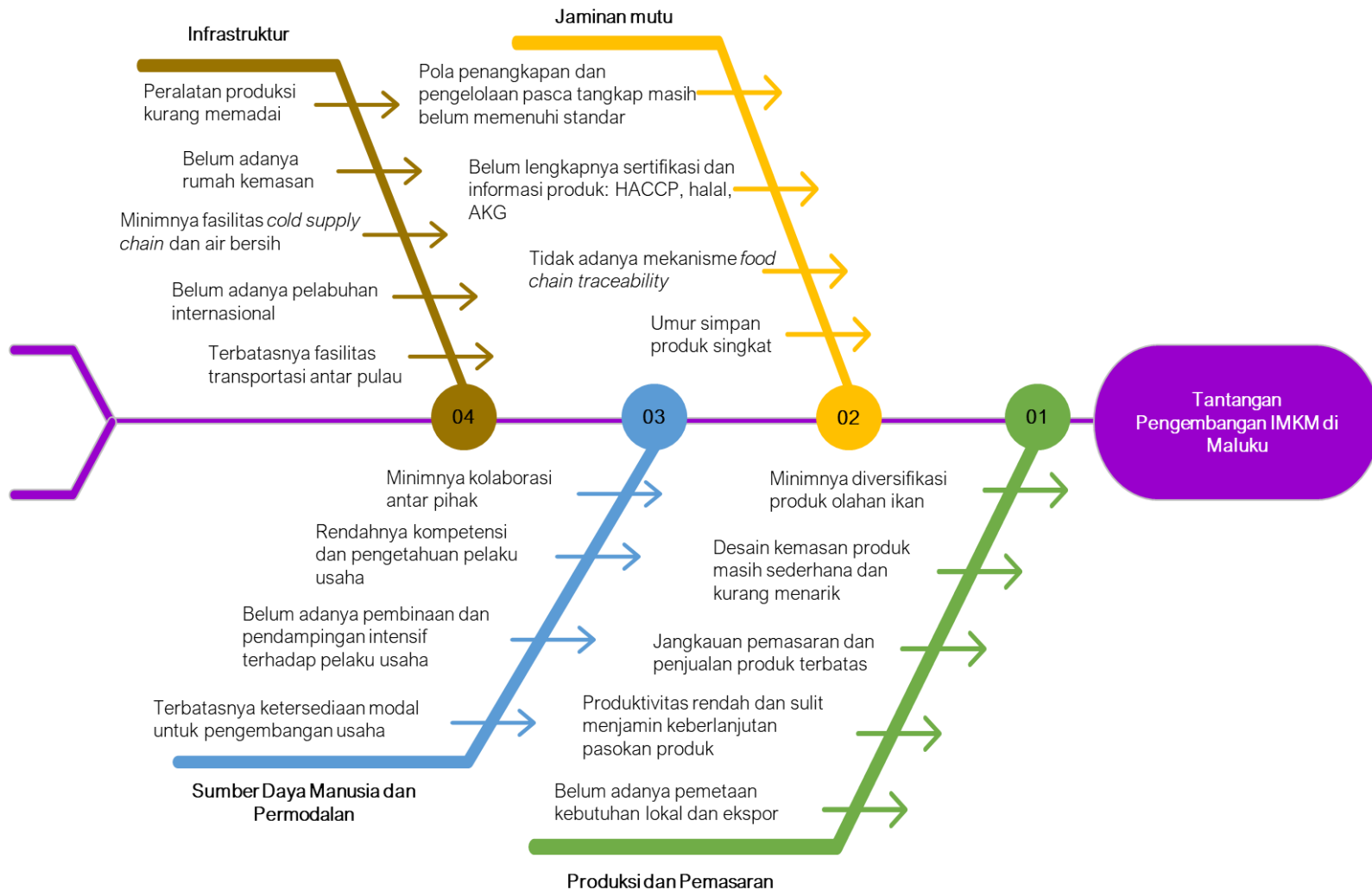
2.4.1. Produksi dan Pemasaran

Potensi ekonomi sektor perikanan Maluku belum termanfaatkan secara optimal karena banyaknya tantangan pada keseluruhan proses bisnis. Produksi dan pemasaran menjadi faktor penting dalam upaya pengembangan IMKM perikanan di tengah persaingan pasar baik domestik maupun internasional. Menurut kajian Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas, 2016), Maluku masuk dalam klaster wilayah dengan hasil nilai LQ (*Location Quotient*)¹³ tinggi namun volume produksi rendah beserta dengan empat provinsi lain, yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu dan Maluku Utara. Metode LQ tersebut biasa digunakan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi sektor atau lapangan usaha pada suatu wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Maluku memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan usaha di sektor perikanan dengan meningkatkan volume produksinya sehingga strategi yang direkomendasikan lebih berfokus kepada peningkatan populasi industri pengolahan hasil perikanan terutama IMKM dan pengembangan industri hasil perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi.

¹³ LQ pada dasarnya adalah cara untuk mengukur seberapa terkonsentrasi industri, klaster, pekerjaan, atau kelompok demografis tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan negara. Hal tersebut dapat mengungkapkan apa yang membuat suatu wilayah “unik” dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dalam istilah yang lebih tepat, LQ adalah rasio yang membandingkan suatu wilayah dengan wilayah referensi yang lebih besar menurut beberapa karakteristik atau aset (Economic Modeling Specialist Inc., 2007).



Gambar 5.8: Diagram *Fishbone* Tantangan Pengembangan IMKM Perikanan di Maluku



Sumber: Penulis.

Dari sisi produksi, minimnya diversifikasi produk olahan ikan menjadi penghambat peningkatan konsumsi ikan ditengah keragaman preferensi makanan olahan, serta masih rendahnya produktivitas dan kesulitan menjamin keberlanjutan pasokan melemahkan daya saing IMKM perikanan. Produk olahan berbahan dasar ikan pada pelaku usaha masih terbatas berupa abon ikan, ikan asap, bakso ikan, dan tuna loin beku. Padahal, pelaku usaha akan lebih berdaya saing jika melakukan diversifikasi dengan produk olahan yang bernilai tambah tinggi seperti *nugget*, siamay, otak-otak ataupun steak ikan (Talib, 2018).

Dari sisi pemasaran, produk hasil IMKM perikanan di Maluku masih didominasi dengan kemasan sederhana dan kurang menarik serta jangkauan pemasaran yang terbatas. Inovasi pada proses distribusi dan pemasaran dapat menangkap peluang luasnya pasar dan pesatnya perkembangan perdagangan secara *online*. Selaras dengan penelitian (Asriningputri & Handayeni, 2018), dari hasil analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) diperoleh strategi prioritas pengembangan berupa perbaikan label dan kemasan produk hasil perikanan, pemasaran produk secara terpusat pada sentra perikanan, dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk.

Lebih lanjut, belum adanya pemetaan kebutuhan lokal dan ekspor menyebabkan tidak fokusnya strategi pemasaran produk. Di satu sisi, ikan termasuk bahan pokok sehingga perlu dipastikan alokasi dan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Namun disisi lain, hasilnya yang berlimpah dapat dimanfaatkan sebagai produk unggulan ekspor, yang mana preferensi konsumen dan persyaratan ekspor dapat disiapkan lebih awal dengan mengetahui negara tujuan ekspor.

2.4.2. Jaminan Mutu

Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan faktor krusial dalam menysasar pasar ekspor di tengah ketatnya persaingan global. Karakteristik produk hasil perikanan yang mudah dirusak oleh mikroorganisme jika tidak diolah sesuai dengan prosedur yang benar, ditambah memiliki umur simpan produk yang singkat menjadi resiko dan menambah beban biaya penangangan bagi IMKM. Oleh karena itu, perlu diterapkan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) kepada IMKM.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh IMKM berupa belum adanya mekanisme *food chain traceability* (ketertelusuran rantai pasok pangan), belum lengkapnya sertifikasi (misal sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) atau sertifikat HACCP) dan informasi produk, serta pola penangkapan dan pengelolaan pasca panen masih belum memenuhi standar. Padahal, menurut Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Fiana, 2021), sistem ketertelusuran disusun untuk menjawab tiga persoalan yang seringkali dihadapi oleh pelaku usaha. Pertama, untuk memberikan tanggapan/tindakan terhadap risiko potensial yang dapat timbul dari pangan atau pakan. Kedua, untuk mengidentifikasi suatu risiko dalam penelusuran akar masalah. Ketiga, untuk menarik produk yang menjadi target sehingga mengurangi risiko kerugian dalam perdagangan.

2.4.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Permodalan

Sumber daya alam perikanan yang melimpah di Maluku dapat dimanfaatkan oleh IMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya, namun faktor sumber daya manusia dan permodalan masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Rendahnya kompetensi dan kemampuan pelaku usaha serta belum adanya pembinaan intensif terhadap IMKM menjadi faktor pendorong rendahnya diversifikasi produk pengolahan ikan. Banyak IMKM di Maluku yang belum



menguasai keterampilan cara mengolah hasil perikanan sehingga masih mengandalkan pengolahan secara sederhana.

Selain itu, minimnya kolaborasi antar pihak dan terbatasnya ketersediaan modal menjadi tantangan lebih lanjut bagi IMKM perikanan Maluku. Sektor perikanan ini merupakan salah satu sektor unggulan di Maluku sebagaimana tergambarkan dengan kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,89% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku pada triwulan II (Nurpramana et al., 2022) sehingga sudah seyogyanya didorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan perguruan tinggi untuk pengembangan IMKM perikanan. Sebagaimana menurut Riyanto & Mardiansjah (2018), kemitraan pelaku usaha dengan pemerintah dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing produk melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana serta fasilitas promosi. Kemitraan dengan lembaga keuangan dapat menjadi sumber permodalan bagi pelaku usaha. Sementara itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi ataupun pelatihan teknis dan pembinaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Dari sisi permodalan, IMKM perikanan perlu mendapatkan akses modal agar dapat mengembangkan usaha perikanan dalam skala yang lebih besar dan menggunakan teknologi yang lebih modern.

2.4.4. Infrastruktur

Terbatasnya fasilitas transportasi antar pulau di Maluku menghambat akses pasar dari produk IMKM perikanan. Salah satunya disebabkan oleh beberapa pelabuhan di wilayah Maluku yang belum dapat disinggahi kapal pelni dan hanya dapat disinggahi oleh kapal *feeder* dikarenakan panjang dermaga yang belum memadai. Menurut Anggrahini (2018), konektivitas antar wilayah di kepulauan Maluku dapat ditingkatkan kombinasi antara jadwal pelayanan antar kapal pelni, kapal *feeder* dan kapal perintis untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di kepulauan Maluku.

Selain itu, belum adanya rumah kemasan di Maluku menjadi tantangan bagi IMKM dalam inovasi desain dan kemasan yang lebih menarik konsumen. Saat ini sudah terdapat total 27 rumah kemasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebaran 10 rumah kemasan di pulau Sumatera, sembilan di pulau Jawa-Bali, lima di pulau Kalimantan, dua di pulau Sulawesi dan satu di Nusa Tenggara Barat (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022). Melalui pengembangan rumah kemasan, diharapkan kemasan produk IMKM akan semakin meningkat baik dari aspek desain, bahan kemasan dan label produk yang juga berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Adapun untuk *cold storage* yang sudah ada di kota Ambon sebagian besar dikelola oleh swasta dan saat ini belum menjalankan perannya sebagai fasilitas logistik dalam menstabilkan harga ikan di Maluku (Siahainenia et al., 2018). Permasalahan lain yang dihadapi yaitu terbatasnya pasokan air bersih, yang mana Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui Ambon menjadi sumber pasokan air bersih bagi kapal penangkapan ikan, namun juga dibutuhkan oleh pabrik es, UPI, perkantoran, dan perumahan di sekitar wilayah PPN (Matrutty et al., 2017).

Lebih lanjut, proses pengolahan dan ekspor langsung dari Maluku dapat memberikan nilai tambah yang berdampak bagi kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan dan juga pemerintah daerah. Namun demikian, ketersediaan UPI menengah besar hanya ada sekitar 56 unit dan belum adanya pelabuhan internasional menyebabkan hasil produksi perikanan lebih banyak dibawa keluar

Maluku (Media Center Pemerintah Provinsi Maluku, 2021). Di sisi lain, rencana pembangunan NAP (*New Ambon Port*) masih terkendala dan masih menunggu kesiapan penetapan lokasi.

3. Rekomendasi Kebijakan

Hasil pemetaan pada matriks BCG menunjukkan bahwa saat ini produk olahan perikanan Indonesia belum ada yang masuk pada kategori “*Cash Cow*” (pangsa pasar relatif tinggi, pertumbuhan pasar rendah). Dengan kata lain, belum ada produk olahan perikanan Indonesia yang menjadi pemain utama atau mendominasi pasar ekspor. Produk-produk olahan perikanan Indonesia saat ini hanya mengisi kuadran “*Star*”, “*Question Mark*”, dan “*Pet*”, dimana strategi utama untuk ketiga kuadran tersebut adalah melakukan investasi. Dalam hal ini, investasi perlu dilakukan untuk dapat lebih menggarap potensi pasar produk olahan perikanan yang belum sepenuhnya termanfaatkan dan diproyeksikan terus bertumbuh. Industri pengolahan ikan menjadi sektor yang menjanjikan bagi peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat karena didorong oleh nilai gizi ikan yang tinggi, pertumbuhan industri akuakultur, dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat (Market Data Forecast Ltd, 2022).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, Investasi yang diarahkan untuk pembangunan kawasan industri perikanan di Maluku akan sejalan dengan sasaran ekonomi makro tahun 2020 – 2024, yaitu untuk mengurangi ketimpangan wilayah, dimana pengembangan industri perikanan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku. Dengan pembangunan kawasan tersebut, Papua juga dapat merasakan manfaatnya karena Maluku akan menjadi *hub* (pusat kegiatan) bagi kedua wilayah tersebut sehingga terjadi efisiensi mata rantai perdagangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah harus membuat skema investasi yang menarik bagi para investor, memberikan jaminan kepastian hukum yang tidak mudah berubah-ubah, kemudahan proses administrasi, serta menyediakan insentif dan fasilitas pajak yang ramah terhadap investor (*investor-friendly tax incentives and facilities*).

Kebutuhan investasi untuk menyiapkan IMKM perikanan Maluku menjadi sentra industri perikanan yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian berikut ini.

3.1. Investasi untuk Pengembangan SDM

Ada beberapa kategori SDM utama yang perlu dikembangkan untuk menunjang pengembangan industri perikanan di Maluku, yaitu pelaku IMKM, tenaga pemasaran, dan nelayan pemasok bahan baku industri. Pelaku IMKM perlu diberi pembinaan dan pendampingan untuk bisa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam mengembangkan usaha dan produk sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan sesuai dengan selera pasar luar negeri. Upaya pembinaan dan pendampingan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan asosiasi seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dan APMIKIMMDO (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia). Sementara itu, tenaga pemasaran perlu dibekali ilmu untuk menggali dan mengenali potensi pasar ekspor dengan cara memetakan perbedaan kebutuhan konsumen lokal dan global sehingga produk yang dihasilkan dapat disesuaikan berdasarkan target pada masing-masing pasar. Di sini, peranan Kementerian Perdagangan,



khususnya Atase Perdagangan, menjadi penting untuk memberikan informasi mengenai preferensi dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara tujuan.

Selanjutnya, nelayan sebagai pemasok bahan baku juga perlu mendapatkan intervensi dalam proses pembangunan kawasan industri sebab kualitas produk yang akan dipasarkan nantinya sangat tergantung pada bahan baku yang disetorkan oleh nelayan. Oleh karena itu, nelayan perlu dilibatkan dan difasilitasi untuk melakukan praktik-praktik penangkapan dan budidaya ikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor produk olahan perikanan. Dengan melibatkan nelayan pada sisi hulu, maka keberlanjutan pasokan bahan baku yang berkualitas dapat lebih terjamin dan produktivitas industri perikanan dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, kesejahteraan nelayan juga akan membaik.

3.2. Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor kunci akselerasi pengembangan sentra industri di Maluku, dimana investasi pada sektor ini membutuhkan komitmen dan modal besar. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan skema investasi PPP (*Public-Private Partnership* atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Adapun beberapa infrastruktur yang dibutuhkan antara lain rumah kemasan, gudang pendingin (*cold storage*), rumah produksi bersama, dan pelabuhan internasional.

Rumah kemasan perlu didirikan di Ambon (ibu kota Maluku) karena saat ini belum ada pabrik kemasan di Maluku sehingga para pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam memilih desain kemasan untuk produknya karena kemasan yang selama ini digunakan harus dikirim dari luar pulau (Sulawesi atau Jawa). Sementara itu, gudang pendingin perlu dibangun di beberapa lokasi gugus pulau¹⁴ yang ada di Maluku untuk menjamin hasil perikanan tetap segar pasca penangkapan atau panen hingga proses pengolahan dan umur simpan produk bisa lebih lama. Ukuran dan bentuk gudang pendingin dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi perikanan pada masing-masing gugus. Dengan dukungan sistem informasi dan teknologi, gugus pulau juga akan menjadi basis dalam membangun sistem ketertelusuran (*traceability*).

Selain itu, rumah produksi bersama diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas IMKM dalam memenuhi permintaan pasar ekspor yang menuntut skala besar, kontinuitas, dan stabilitas. Rumah produksi bersama harus dilengkapi dengan peralatan produksi yang cukup memadai serta laboratorium untuk menguji kualitas produk yang dihasilkan agar dapat memenuhi berbagai standar sertifikasi yang dibutuhkan. Letak rumah produksi bersama harus dekat dengan lokasi gudang pendingin. Terakhir, keberadaan pelabuhan internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem logistik untuk menunjang kelancaran, efisiensi, dan optimalisasi potensi ekspor produk perikanan yang akan dikirim ke berbagai negara tujuan. Oleh karena itu,

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014, Gugus pulau adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem gugus pulau ini diterapkan di Maluku sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, yaitu mencapai 1.337 pulau (Badan Pusat Statistik, n.d.a), untuk menjawab tantangan pembangunan yang lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan wilayah yang didominasi oleh daratan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018, menyebutkan ada 12 gugus pulau di Maluku, yaitu: Pulau Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Selatan, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kepulauan Banda, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kei, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Terselatan

pelabuhan internasional harus menjadi salah satu agenda utama pemerintah jika ingin berkomitmen memajukan kawasan industri pengolahan ikan di Maluku.

4. Penutup

Sebagai negara maritim, sudah seharusnya Indonesia menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi pada tingkat nasional maupun regional. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas Maluku guna memaksimalkan kemampuan Indonesia dalam mengisi pasar produk perikanan secara global menjadi penting dan perlu segera dilakukan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemetaan pada matriks BCG menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih relatif rendah yang ditunjukkan dari belum adanya produk olahan perikanan yang mendominasi pasar ekspor atau berada dalam kategori “Cash Cow” (pangsa pasar relatif tinggi, pertumbuhan pasar rendah). Sementara itu, ada dua kode HS (03.07 dan 03.08) masuk dalam kuadran “Star” (pangsa pasar relatif tinggi, pertumbuhan pasar tinggi), tiga kode HS (03.04, 16.04, dan 16.05) berada pada kuadran “Question Mark” (pangsa pasar relatif rendah, pertumbuhan pasar tinggi) dan sisanya tiga kode HS (03.03, 03.05, dan 03.06) tergolong dalam kategori “Pet” (pangsa pasar relatif rendah, pertumbuhan pasar rendah).

Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi investasi secara jangka panjang yang diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi pada komponen-komponen berikut: 1) produksi dan pemasaran; 2) jaminan mutu; 3) sumber daya manusia dan permodalan; dan 4) infrastruktur.

Kunci keberhasilan strategi yang dijalankan akan sangat tergantung pada sinergi dan kolaborasi multi pihak, dimana pemerintah pusat harus menjadi simpul pemersatu para pemangku kepentingan, yang terdiri atas pemerintah daerah, dinas terkait, swasta, badan usaha milik negara (BUMN), universitas, komunitas, berbagai lembaga lainnya hingga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim pengembangan IMKM yang tidak hanya berdaya saing dan produktif, melainkan juga berkelanjutan dan atraktif untuk peluang investasi yang lebih besar di masa depan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, khususnya karena sumber data dalam penelitian ini hanya mengandalkan FGD (*focus group discussion*) dan wawancara secara online serta studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah pelaku IMKM yang ikut dalam kegiatan FGD terbatas. Pihak pemerintah daerah Maluku yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan FGD hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang memiliki keterbatasan data ekspor produk olahan perikanan dan minim informasi mengenai berbagai permasalahan atau kendala ekspor yang dialami oleh pelaku IMKM. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik dokumentasi, wawancara mendalam, dan survei langsung kepada para pelaku IMKM dan pihak-pihak terkait lainnya sehingga data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif dan komprehensif.

Referensi

- Anggrahini, W. P. (2018). Upaya Peningkatan Konektivitas Angkutan Laut Dan Penyeberangan antar Kabupaten / Kota Di Maluku. *Warta Penelitian Perhubungan*, 30(1), 23. <https://doi.org/10.25104/warlit.v30i1.630>
- Anjaritha. (2017). Fish Fillet and Other Fish Meats. *Market Brief ITPC Osaka HS 0304*. <https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/10/Market-Brief-ITPC-Osaka-2017-HS-0304-Fish-Fillet-and-Other-Fish-Meats.pdf>
- Apituley, Y. (2013). *Model Pengembangan Sistem Pemasaran Ikan Segar di Kawasan Maluku Tengah* [Doctoral dissertation]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66036?show=full>
- Apituley, Y., Bawole, D., Savitri, I., & Tuapetel, F. (2018). Pemetaan Rantai Nilai Ikan Pelagis Kecil di Kota Ambon. *PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan*, 2(1), 15-21. <https://doi.org/10.30598/papalele.2018.2.1.15>
- Asriningputri, N., & Handayeni, K. D. (2019). Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33116>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Maluku 2015*. https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/03.%20Analisis%20Provinsi%20Maluku%202015_ok.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2022, September 19). *Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Maluku 2021* (81000.2232). <https://maluku.bps.go.id/publication/2022/09/19/350d09ffed14b81e1b4c67bc/perkembangan-ekspor-dan-impor-provinsi-maluku-2021.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). [Seri 2010] *Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)*. <https://www.bps.go.id/indicator/11/106/1/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-seri-2010-atas-dasar-harga-berlaku.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022b). [Seri 2010] *PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)*. <https://www.bps.go.id/indicator/11/65/1/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.a.). *Industri Mikro dan Kecil*. <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.b.). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1
- Badan Pusat Statistik. (n.d.c.). [Metode Baru] *Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>

- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. (2021). BRSDM KP Dalam Angka 2020. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Buku/BRSDM%20KP%20DALAM%20ANGKA%202020>
- Bappenas (2016). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Disampaikan dalam Acara Workshop Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Jakarta Coral Initiatives Jakarta, 22 November 2016
- Bashir, A., Ishak, Z., Asngari, I., Mukhlis, M., Atiyatna, D. P., & Hamidi, I. (2019). The Performance and Strategy of Indonesian's Fisheries: A Descriptive Review. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 31-36. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7188>
- BCG Global. (n.d.). *What is the growth share matrix?* <https://www.bcg.com/about/overview/our-history/growth-share-matrix>
- CBI. (2021, August 30). *What is the demand for fish and seafood on the European market?* <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand>
- Chin, K., Shamo, L., & Abadi, M. (2020, February 15). China is dominating the global caviar industry — and prices are plummeting because it's flooding the market. *Business Insider*. <https://www.businessinsider.com/china-caviar-prices-kaluga-queen-2020-2>
- Dao, T. (2021, June 30). *Vietnam adjusting seafood export strategy to cope with slower sales to China*. SeafoodSource. <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/vietnam-adjusting-seafood-export-strategy-to-cope-with-slower-sales-to-china>
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP). (2022). *Statistik Ekspor Produk Perikanan Tahun 2017-2021*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/42957-buku-statistik-ekspor-produk-perikanan-tahun-2017-2021>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. <https://malukuprov.go.id/storage/2022/06/lkip2021/28.%20LKIP%20Dinas%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Tahun%202021.pdf>
- Economic Modeling Specialists Inc. (2007). Understanding Location Quotient. *EMSI Resource Library*. https://www.economicmodeling.com/wp-content/uploads/2007/10/emsi_understandinglq.pdf
- Edwards, G. N. (1994). *Market Share, Profitability and Implications for Strategy Formulation* [Master's thesis]. <https://core.ac.uk/download/pdf/39675806.pdf>
- Eurofish. (2021, March 30). *Added value due to more processing*. <https://eurofish.dk/added-value-due-to-more-processing/>
- European Commission. (n.d.). *EU-Vietnam Trade Agreement and Investment Protection Agreement*. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/vietnam/eu-vietnam-agreement_en

- Fajriah, L. (2016, March 16). Gambarkan Potensi Maritim RI, Susi Kutip Kata-kata Soekarno. *SINDONEWS.com*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1093395/34/gambarkan-potensi-maritim-ri-susi-kutip-kata-kata-soekarno>
- Fiana, B. (2021, March 5). *Jaga Mutu dan Keamanan Pangan, KKP Siapkan Sistem Ketertelusuran Hasil Perikanan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://kkp.go.id/artikel/27829-jaga-mutu-dan-keamanan-pangan-kkp-siapkan-sistem-ketertelusuran-hasil-perikanan>
- Fishstreat. (2020, November 15). *10 Negara Pengekspor Ikan Terbesar*. <https://fishstreat.com/2020/11/15/10-negara-pengekspor-ikan-terbesar/>
- Flick, Jr., G. (2010). *Smoked fish, part 2*. Global Aquaculture Advocate. <https://www.globalseafood.org/advocate/smoked-fish-part-2/?savePDF=4302f6f1f06ca8e89e39b7d3d32a324d&article=smoked-fish-part-2>
- FAO. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en/>
- FAO(2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0461en>
- Future Market Insights. (2022). *Molluscs Market Outlook (2022-2032)*. <https://www.futuremarketinsights.com/reports/molluscs-market#>
- Hiariey, L. S., & Romeon, N. R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pengolah Ikan Asap di Desa Hative Kecil, Kota Ambon. *Jurnal Matematika Sains dan Teknologi (JMST)*, 16(1), 26-35. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jmst/article/view/221>
- Hieu, H. T. (2019). *Export Guide: Vietnam* (OMIS Report TRM525/18). The Department for International Trade (DIT) in Vietnam for Sea Fish Industry Authority. <https://www.seafish.org/document/?id=eba4aff1-4b7d-4cc3-904d-fd4069dcb331>
- Holmyard, N. (2012, May 14). *Thailand emerges as global seafood powerhouse*. SeafoodSource. <https://www.seafoodsource.com/features/thailand-emerges-as-global-seafood-powerhouse>
- ITC. (2022). *Export Potential Map*. <https://exportpotential.intracen.org/en/>
- ITC. (n.d.). *Yearly Time Series*. Trade Map - Trade statistics for international business development. <https://www.trademap.org/>
- Jadera, E. M., Apituley, Y. M., & Papilaya, R. L. (2017). Analisis keunggulan bersaing ikan asap tunaca Di Kota ambon. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 1(1), 30-38. <https://doi.org/10.30598/papalele.2017.1.1.30>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Jenis Produk Barang dan Jasa Kelautan serta Jenis Produk Barang dan Jasa Perikanan*. <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/3fe12-2021kepmen-kp54.pdf>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat*

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/df947-2022kepmen-kp19.pdf>

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2022 (Vol. 1 Tahun 2022). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/Book/Buku_KPDA_2022_270522_FINAL_FIX_FP_SP.pdf

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Klinik Desain Merek Kemas - Kemenperin. <https://e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id/>

Kusumawardhani, R. T. (2022). Menilik Kelanjutan Program Lumbung Ikan Nasional Maluku. *Industri dan Pembangunan Budget Issue Brief*, 2(7).

Li, K. W. (2017). *Redefining Capitalism in Global Economic Development, Chapter 1 - The Individual*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804181-9.00001-X>

Lind, P. (2005). Competitiveness through Increased Added Value: A Challenge for Developing Countries. *Journal of Comparative International Management (JCIM)*, 8(1), 42-57. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCIM/article/view/434>

Mackin, K. M. (2018, February 5). FDA sends warning letters to Indonesian seafood companies. *Food Safety News*. <https://www.foodsafetynews.com/2018/02/fda-sends-warning-letters-to-six-seafood-importers-in-indonesia/>

Market Data Forecast Ltd. (2022). *Fish processing market*. <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/fish-processing-market/table-of-contents>

Market growth. (n.d.). In *Cambridge dictionary | English dictionary, translations & thesaurus*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/market-growth>

Matrutty, D., Kili-kili, G., & Paillin, B. J. (2017). Distribusi dan Tingkat Pemanfaatan Air Bersih Unit Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantai Ambon. *Amanisal*, 6(2), 1-7. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_Ink.php?id=1831

Maximize Market Research. (2022, May 20). *Fish processing market- Global industry analysis and forecast (2021-2027) trends, statistics, dynamics, segmentation by type, species, application, and region*. <https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/fish-processing-market/147841/>

Media Center Pemerintah Provinsi Maluku. (2021, November 4). BKIPM Maluku Gelar FGD Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Media Center Maluku Prov*. <https://mediacenter.malukuprov.go.id/bkipm-maluku-gelar-fgd-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-berkelanjutan/>

Menteri Perindustrian Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri*. https://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2227

- Nasution, R. (2021, February 13). Indonesia yet to rank top among world's fishery product exporters. *Antara News Kalsel*. <https://kalsel.antaranews.com/berita/234705/indonesia-yet-to-rank-top-among-worlds-fishery-product-exporters>
- Ningsih, R. (2018). *Strengthening Indonesia's Exports of Fish and Processed Fish Products to Canada*. Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project (TPSA). <https://www.iccc.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Strengthening-Indonesia%E2%80%99s-Export-of-Fish-and-Processed-Fish-Products-to-Canada-January-2018.pdf>
- OECD glossary of statistical terms - Competitiveness (in international trade) definition. (2014). In *OECD statistics*. <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399>
- OECD. (2002). *High-Growth SMEs and Employment*. <https://www.oecd.org/industry/smes/2493092.pdf>
- OECD. (2004). *Facilitating SMEs Access to International Markets*. <https://www.oecd.org/cfe/smes/31919223.pdf>
- OECD. (2018). Fostering greater SME participation in a globally integrated economy. *OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1787/400c491d-en>
- OECD-FAO. (2020). Annual GDP growth rates 2020-2029. *OECD-FAO Agricultural Outlook*. <https://doi.org/10.1787/8075e992-en>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Profil Industri Pengolahan – Jumlah Industri Pengolahan*. <https://www.ojk.go.id/sijaring/id/sector-kelautan-dan-perikanan/usaha-pengolahan-produk-kelautan-dan-perikanan/detail-dokumen.aspx?dokumenid=20>
- Palyama, A. F., & Dharmayanti, N. (2021). Identifikasi Produktivitas Pengolahan tuna Beku Pada PT. Maluku prima Makmur Di Kota Ambon. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 15(1), 1-17. <https://doi.org/10.33378/jppik.v15i1.233>
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2038*. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LPSPL%20SORONG/PERDA%20NO%201%20THN%202018%20TTG%20RZWP3K%20PROVINSI%20MALUKU.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41571/perpres-no-77-tahun-2014>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Pramono, Y. E., Fathoni, M., Marpaung, H., Wiropurnomo, H., Hanifah, T., Robiyanto, S., & Aida, N. (2015). *Pedoman Ekspor Perikanan ke Negara Mitra (Belanda, Thailand, dan Jepang)*. Direktorat Akses Pasar dan Promosi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://meacenter.kkp.go.id/new/wp-content/uploads/2016/11/PEDOMAN-EKSPOR-BELANDA-JEPANG-THAILAND.pdf>

- Nurpramana, D. E., Geinusa, A., Utomo, I. B., Sholeh, M., Ramadhani, A. N., Manuputty, M., & E. Samuel, G. F. (2022). Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan II TA 2022.
- Riyanto, S., & Mardiansjah, F. H. (2018). Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(1), 61. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.17659>
- Saferina, A. W. (2019). *Analisis Daya Saing dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Perikanan Indonesia* [Master's thesis]. <http://eprints.ums.ac.id/78635/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20ANUGRAH.pdf>
- Sariani, S., Siahainenia, S. M., & Talakua, E. G. (2017). Evaluasi usaha pengolahan suwir-suwir ikan cakalang Di Desa namlea. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 1(2), 78-84. <https://doi.org/10.30598/papalele.2017.1.2.78>
- Siahainenia, S. M., Bawole, D., & Talakua, E. G. (2018). Stabilitas Harga Ikan di Kota Ambon melalui Peran Cold Storage, Optimasi Produksi dan Efisiensi Teknis. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 2(2), 74-84. <https://doi.org/10.30598/papalele.2018.2.2.74>
- Siahainenia, S. M., & Hiariey, J. (2017). Prospek Pengembangan UMKM Pengolahan Ikan di Kota Ambon. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 1(1), 10-15. <https://doi.org/10.30598/papalele.2017.1.1.10>
- Son, T. (2021, July 3). More Convenient Tra Fish Exports to the US with New Anti-Dumping Tax. *Nong Nghiep Vietnam Agriculture*. <https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/more-convenient-tra-fish-exports-to-the-us-with-new-anti-dumping-tax-d295756.html>
- Statista. (2021, January). *Leading exporters fish and fishery products worldwide, 2020 (in billion U.S. dollars)*. <https://www.statista.com/statistics/268269/top-10-exporting-countries-of-fish-and-fishery-products/>
- Sufa, T. (2016, November 13). Indonesian Fishery Products Seeing High Rejection Rate in US. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/11/13/indonesian-fishery-products-seeing-high-rejection-rate-in-us.html>
- Talakua, E. G., Anaktototy, Y., & Ohello, B. (2022). Nilai Tambah Usaha Pengolahan Ikan Asar di Pantai Tanjung Marthafons Desa Poka. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan)*, 6(1), 10-20. <https://doi.org/10.30598/papalele.2022.6.1.10>
- Talib, A. (2018). Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) Di Maluku Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.19-27>
- Urata, S. (2021). *Enhancing SME Participation in Global Value Chains: Determinants, Challenges, and Policy Recommendations*. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/enhancing-sme-participation-global-value-chains>
- Wibowo, A., & Widria, Y. (2019, December 31). *Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro Kecil dalam Pasar Global*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpdspkp/bbp2hp/artikel/16224-unit-pengolahan-ikan-upi-mikro-kecil-dalam-pasar-global>



World Bank. (2021, March 25). *Oceans for prosperity: Reforms for a blue economy in Indonesia*. <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/03/25/oceans-for-prosperity-reforms-for-a-blue-economy-in-indonesia>

Yusuf, H. (2019). Peningkatan Peran Bea Cukai dalam Mendorong Ekspor Komoditas Perikanan: Studi Kasus di Wilayah Maluku. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 31-41. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.363>

